

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan bagian dari sosiologi yang secara khusus mempelajari masyarakat internasional (Sociology of international relation). Jadi, ilmu hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik, tetapi juga mencakup unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya (Schwarzenberger dalam Perwita dan Yani, 2005: 1). Sementara itu, Mc. Clelland dalam Perwita & Yani mendefinisikan hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis unit sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan yang relevan di sekitar interaksi (Mc. Clelland dalam Perwita dan Yani, 2005: 4).

Pola hubungan internasional tidak terlepas dari segala bentuk interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh aktor negara maupun aktor non negara. Pola hubungan atau interaksi tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan, dan konflik atau konflik (Rudy, 2003: 2).

Hubungan internasional merupakan suatu bentuk interaksi antara aktor atau anggota suatu masyarakat dengan aktor atau anggota masyarakat lainnya. Secara umum kajian hubungan internasional merupakan kajian tentang interaksi antar aktor yang melintasi batas negara. Hubungan internasional di masa lalu difokuskan pada studi tentang perang dan perdamaian kemudian diperluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang terjadi dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global namun tetap terfokus pada hubungan politik yang pada umumnya disebut "politik tinggi". Bahwa hubungan internasional saat ini selain tidak hanya memfokuskan perhatian dan kajian terhadap hubungan politik yang terjadi antar negara atau antar bangsa yang ruang

lingkupnya melintasi batas negara, tetapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor non negara.

Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah menjadi multipolar atau secara khusus telah menggeser persaingan yang bernuansa militer menuju persaingan atau konflik kepentingan ekonomi antar negara di dunia. Setelah perang dingin, masalah hubungan internasional yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada isu politik tinggi (politik dan keamanan) berkembang menjadi isu politik rendah (isu HAM, ekonomi, lingkungan, terorisme) (Perwita dan Yani, 2005: 7).

Interaksi internasional terjadi tidak hanya melalui interaksi, tetapi juga melalui berbagai interaksi yang dilakukan oleh negara lain untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya sendiri. Ketika entitas negara menjalin hubungan di dunia internasional, negara tersebut terlibat dalam sejenis interaksi yang disebut interaksi internasional. Hal ini didasarkan pada hubungan negara dengan dunia internasional, dalam hubungan ini negara harus memperhatikan kepentingannya di kancah internasional.

Dalam interaksi internasional, interaksi terdiri dari jumlah pihak yang menjaga hubungan, dan hubungan tersebut dibagi lagi menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional, multilateral atau internasional. Dari perspektif dan tujuan semua pihak, kita dapat melihat pola-pola yang terbentuk dalam proses interaksi tersebut. Pihak yang menjaga hubungan timbal balik dibedakan menjadi modus kerjasama, modus persaingan dan modus konflik (Perwita dan Yani, 2005: 42).

Seperti yang ditunjukkan oleh Karen Mingst dalam "Pengantar Hubungan Internasional" "Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antar berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, termasuk negara bagian, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, entitas sub nasional seperti Pemerintah daerah dan individu" (Wijatmadja, 2016 : 4-5).

Menurut Bakry, “Hubungan Internasional mengkaji interaksi antara aktoraktor dalam hubungan internasional, baik itu state actor, maupun non-state actor meliputi negara bangsa, organisasi internasional dan perusahaan multinasional, studi hubungan internasional mencoba menjelaskan berbagai interaksi antarnegara, masyarakat dan institusi yang melintasi batas-batas nasional, mulai dari studi tentang perang, damai hingga kerja sama ekonomi dan konflik lingkungan” (Bakry, 2016 : 59).

Dua definisi pertama menekankan cara interaksi dalam hubungan internasional. Modus interaksi dalam hubungan internasional dapat berupa kerjasama, persaingan atau konflik. Bentuk kerjasama, persaingan atau konflik adalah semua interaksi antara peserta negara dan non-negara. Anggota Asosiasi Sosial Internasional. Menurut CJ Holsty dalam bukunya "Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis", hubungan internasional selalu dikaitkan dengan interaksi, berbagai interaksi yang melintasi batas negara atau hukum, dan keduanya adalah interaksi antara pemerintah dengan negara, atau negara antar negara.

Tema penelitian internasional meliputi tiga bentuk interaksi: hubungan antar negara, hubungan transnasional non-negara atau transnasional, dan fungsi negara dan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem yang terutama (Wijatmadja 2016: 5). Merupakan ilmu yang mempelajari hubungan internasional untuk mempelajari dinamika berbagai bidang, seperti politik (internasional), ekonomi (internasional), organisasi internasional (IO), organisasi antar pemerintah (IGO) dan organisasi non-pemerintah internasional. (INGO). Organisasi non-pemerintah (LSM) dan perusahaan multinasional (TNC), hukum internasional, teori hubungan internasional, dll. Pengakuan penelitian hubungan internasional terutama berasal dari pengakuan akan pentingnya mencegah perang dan menjaga ketertiban dunia. Menyebabkan korban manusia dan menimbulkan kerugian materi yang signifikan (Darmayadi, 2015: 19).

Secara tradisional, ruang lingkup hubungan internasional adalah bahwa negara-negara peserta hubungan internasional memiliki kepentingannya sendiri-sendiri, terutama masalah

keamanan dan kekuasaan nasional. Pada saat itu, krisis antar negara, perlombaan senjata, perang, dan penyebab perang menjadi tema sentral hubungan internasional. Kemudian diplomasi, hukum internasional, tatanan dunia, gender, lingkungan, dll menjadi tema hubungan internasional.

Aktor dalam hubungan internasional adalah siapa saja yang berperan dalam hubungan internasional yang melibatkan suatu negara, maupun bukan negara. Berikut ini diantaranya; Negara yang berinteraksi dengan aktor dalam hubungan internasional untuk mengejar kepentingan nasional; Organisasi internasional: organisasi yang memiliki kegiatan di dua atau lebih negara yang melampaui batas nasional; Perusahaan multinasional - banyak kantor di berbagai negara perusahaan wilayah dan berada di negara asal. Teroris adalah istilah yang merujuk pada tindak kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menimbulkan rasa takut pada orang lain (Wijatmadja, 2016: 100-115).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008 : 67-69).

Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam membuat atau merumuskan kebijakan luar negerinya. Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau, antara lain : Pertama, perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu

mempertahankan integritas teritorialnya, Kedua perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezimekonomi dan politiknya, Ketiga, perlindungan terhadap budayanya, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya. Kepentingan nasional suatu negara ialah hasil yang dibuat oleh para pengambil kebijakan sehingga kepentingan nasional suatu negara dapat berbeda atau bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi bangsa (Yani, dkk. 2017 : 17).

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, Kekuasaan (power) dan Kepentingan (interest), sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional, kemudian konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya.. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005 : 35).

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.

Kepentingan nasional (national interest) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai

sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (prosperity), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara (Rudy, 2002 : 116).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan. Kekuasaan memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (power). Namun kapabilitas ini merupakan definisi power yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan yang bersifat dinamis. Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial- budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara (Rudy, 2002: 116).

2.1.3 Ekonomi Politik Internasional

Pada dekade 1970-an sejumlah pemikir Hubungan Internasional (HI) mulai memikirkan bagaimana negara-negara yang selalu didorong nafsu berperang, pada waktu yang sama tetap berkeinginan untuk tetap menjalin kerja sama dengan negara lain (Hermawan, 2005: 5).

Para pemikir tersebut (yaitu, menginginkan negara-negara yang selalu didorong nafsu berperang untuk tetap melakukan kerja sama dengan negara lain), sebagaimana yang dijelaskan Hadiwinata, diantaranya adalah Kohane dan Nye, mencoba untuk menggambarkan bagaimana saling ketergantungan di bidang ekonomi telah mendorong negara-negara untuk tetap menjalin kerja sama. Kemudian, Robert Gilpin mencoba mengidentifikasi keberadaan perusahaan multinational sebagai pelaku penting dalam mendorong negara-negara untuk terlibat dalam kerja sama ekonomi. Melalui aktivitas perusahaan-perusahaan multinasional, modal, barang dan jasa dapat saling dipertukarkan melewati batasbatas negara dalam waktu relatif singkat sehingga dengan sendirinya meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara. Sejak saat itu, menurut Hadiwinata ilmu ekonomi mulai mempengaruhi studi Hubungan Internasional (Hermawan, 2007 : 6).

Ekonomi politik dalam studi Hubungan Internasional memerlukan suatu metode dan pendekatan (metode atau pendekatan adalah suatu cara atau prosedur) yang ditempuh dalam proses penyelidikan, penelitian dan pengamatan maupun analisis dari studi ekonomi politik dalam perspektif hubungan internasional, menyangkut aplikasi keilmuan sesuai konteksnya. Ini juga disesuaikan dengan keperluan telaah secara tepat karena ruang lingkup kajian-kajian HI itu sendiri, adalah mencakup segala macam aspek kegiatan yang —melintasi batas wilayah negara dan memiliki karakter khas yaitu, interdisipliner (Rudi, 2002 : 50).

Konfigurasi pendekatan ekonomi politik internasional adalah tidak tunggal (monodisiplin), artinya bahwa implementasi alat-alat analisisnya dapat dilihat pada sejumlah teori dan konsep-konsep yang mendasari substansi ekonomi politik, seperti interdependensi, dependensi, keterbelakangan, pertumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi dan termasuk juga persoalan *power politics*, *realisme* dan *idealisme*, *linier* dan *strukturalis* internasional, *globalisasi*, atau *regionalisme*, dan lain-lain (Ikbar, 2002 : 21).

Secara umum, akan dijelaskan pengertian ekonomi politik terlebih dahulu sebelum menjelaskan definisi/pengertian ekonomi politik internasional itu sendiri. Lord Robbin menjelaskan bahwa: “Ekonomi politik dapat mengandung dua versi. *Pertama*, ialah versi ekonomi klasik yang memberi pengertian ekonomi politik sebagai suatu kesatuan menyeluruh dari suatu pembahasan, sejak dari ilmu ekonomi (murni, teori) itu sendiri (*economics science*) samapi dengan teori-teori tentang kebijakan ekonomi (*theory of economics policy*) yang meliputi analisis dari bekerjanya keuangan negara. Kedua, ekonomi politik versi modern yaitu ekonomi politik yang membahas bagaimana sistem ekonomi itu bekerja. Namun demikian, ia bukanlah *scientific economics* yang merupakan himpunan dari *value free generalization* tentang cara-cara sistem ekonomi itu bekerja. Ekonomi politik di sini membicarakan prinsip-prinsip umum dalam bidang ekonomi” (Ikbar, 2002 : 17).

Pemahaman lain mengenai studi ekonomi politik, sebagaimana dijelaskan oleh Ichman: "Adalah suatu *integrated social science of public purpose*. Dikatakan bersifat politik karena membahas segi otoritas dalam masyarakat. Bersifat ekonomi karena membahas masalah-masalah alokasi dan petukaran sumber-sumber yang langka, termasuk di dalamnya sumber-sumber sosial dan politik. Ekonomi politik berkepentingan dengan semua persoalan yang memiliki relevansi dengan kebijakan-kebijakan dan masalah umum, disamping memperhatikan dan mendorong partisipasi dalam perspektif kehidupan sosial dan politik”(Mas’oed, 2003 : 4).

Secara umum dapat dipahami adanya pertalian erat antara dunia politik dan dunia ekonomi. Mengingat pendapat yang berbeda dalam memahami ekonomi politik dari beberapa pakar di atas, maka di sini ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan; sedang politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur pelbagai interaksi sosial dan ekonomi. Robert Gilpin menjelaskan bahwa: “Hubungan dan interaksi dari “negara” dan “pasar” di dalam dunia modern menciptakan “ekonomi politik”,

tanpa kedua faktor tersebut, tidak akan ada ekonomi politik, dan perbedaan mendasar terletak pada hakikat paradigma ilmu politik yang menekan power dan sebaliknya ilmu ekonomi pada “mekanisme pasar” (Ikbar, 2002 : 19).

Oleh karena itu, Gilpin memandang perlunya untuk memahami tiga unsur dasar dalam isu-isu ekonomi politik. Tiga unsur tersebut adalah; 1) penyebab dan hal-hal yang mempengaruhi kebangkitan pasar; 2) hubungan antara perubahan ekonomi dan perubahan politik; dan 3) Signifikansi ekonomi pasar dunia terhadap ekonomi domestik (Ikbar, 2002 : 19)

Ekonomi politik internasional secara “padat” didefinisikan Mas’oed sebagai studi tentang saling kaitan dan interaksi fenomena politik dengan ekonomi, antara “negara” dengan “pasar”, antara lingkungan domestik dengan yang internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal senada juga dirumuskan oleh Frieden dan Lake, “the study of the interplay of economics and politics in the world arena” (Mas’oed, 2003: 4).

T.M. Rudy menyimpulkan ekonomi-politik sebagai hasil interaksi antara kajian ekonomi dengan kajian politik, yang mempertimbangkan serta dipengaruhi oleh kondisi mekanisme pasar (unsur pasar) dan kondisi kehidupan sosial masyarakat serta pola kebijakan pemerintah (unsur politik) yang satu sama lain saling berinteraksi pula (Rudy 2002 : 5).

Saling berkaitan dan interaksi ekonomi-politik, negara-pasar, negaramasyarakat, dan domestik-internasional, dapat dilihat dari pelbagai usaha pemerintahan di dunia dalam menyelesaikan masalah domestiknya dengan memanfaatkan hubungan internasional. Misalnya, seperti yang dipaparkan Mas’oed, masalah ekonomi domestik negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) sejak lama diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme politik internasional. Begitu juga, Boris Yeltsin sejak menjabat sebagai presiden Russia berusaha memanfaatkan mekanisme ekonomi internasional untuk menyelesaikan masalah domestiknya. Lebih lanjut, Mas’oed menjelaskan beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana masalah internasional dicoba diselesaikan dengan menerapkan kebijakan domestik.

Misalnya, penerapan kebijakan politik domestik pemerintahan Vietnam, terutama “*Doi Moi*” atau “keterbukaan politik”, dengan tujuan lebih besar di arena ekonomi politik internasional, yaitu memperbaiki hubungan dengan aktor-aktor utama dunia, mengingat, sampai awal tahun 1994 hambatan utama bagi Vietnam untuk memanfaatkan sumberdaya ekonomi dunia adalah embargo Amerika Serikat (Mas’oed, 2003 : 5).

Sedangkan Spero mengajukan konstruksi berpikir yang berawal dari pengertian politik internasional dan ekonomi internasional guna memahami makna ekonomi politik internasional. Politik internasional adalah interaksi di antara negara-negara dalam upaya mencapai tujuan masing-masing dan penentuan “*who gets what, when, and how?*”. Perilaku negara dalam ekonomi internasional merupakan “*modus*” untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Maka sebenarnya interaksi ekonomi adalah interaksi politik dalam arena internasional (Perwita dan Yani, 2005: 76).

Perwita dan Yani kemudian melanjutkan dengan menjelaskan ada empat faktor politik yang mempengaruhi ekonomi yang dikemukakan Spero, yaitu:

1. Struktur dan operasi sistem ekonomi internasional dipengaruhi oleh struktur dan operasi politik internasional.
2. Kepedulian-kepedulian politik selalu mempengaruhi kebijakan ekonomi.
3. Kebijakan-kebijakan ekonomi dituntun oleh kepentingan politik
4. Hubungan dalam ekonomi politik internasional adalah hubungan politik interaksi ekonomi internasional, dan hubungan politik adalah proses dimana negara-negara dan aktor non negara mengatur konflik dan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Perwita dan Yani, 2005 : 76).

2.1.4 Fenomena Cryptocurrency dalam hubungan internasional

Cryptocurrencies atau kripto merupakan sesuatu yang kerap menjadi pembicaraan sejak tahun 2020, terutama setelah puncak kenaikan harga dari mata uang kripto, tepatnya bitcoin di sepanjang tahun 2021 yang terbilang sangat fantastis atau bahkan terkesan tidak masuk akal. Masyarakat dunia digemparkan oleh mencuatnya harga bitcoin yang tadinya tidak sampai 10 juta rupiah, sampai ke angka kurang lebih 600 juta rupiah.

Fenomena ini pun selain menarik perhatian dunia kepada cryptocurrencies tetapi juga menimbulkan serangkaian fenomena di seluruh dunia, baik dalam aspek sistem kenegaraan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berawal dari masyarakat dunia yang digemparkan dengan melonjaknya harga bitcoin dari sekitar \$900 hingga kurang lebih \$60.000, yang mana dengan adanya fakta ini orang-orang menjadi tergiur untuk ikut serta meraih keuntungan dari kenaikan harga bitcoin ini, disatu sisi perilaku ini menambah kenaikan dari harga salah satu mata uang kripto tersebut, namun disisi lain hal ini juga membuat banyak negara di dunia kewalahan untuk menentukan sikap dan kebijakan terhadap menyebarnya dan juga maraknya aktivitas perdagangan bitcoin ini.

Karena dengan tingginya harga dari bitcoin dan mata uang kripto lainnya tersebut, didukung juga dengan daya beli di masyarakat, banyak pandangan-pandangan baik dari internal dalam pemerintahan suatu negara maupun di masyarakatnya yang ingin mengesahkan mata uang kripto sebagai nilai tukar resmi atau setidaknya mata uang kripto menjadi mata uang yang bisa dan mudah digunakan untuk transaksi baik itu online maupun offline.

2.1.5 Internasional Trade

Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (state actor) maupun oleh pelaku bukan negara (non-state actor). Pola hubungan atau interaksi

ini dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan pertentangan (conflict) (Rudy, 2003:2).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005:33-34).

Dalam pelaksanaannya kegiatan investasi meliputi pemahaman-pemahaman mendasar yang memang dirasa perlu untuk diperhatikan pastinya sebagai dasar sebelum menentukan keputusan dalam berinvestasi serta untuk mengorganisir aktivitas dan risiko dalam kegiatan investasi tersebut. Secara sederhana tujuan dari kegiatan investasi ialah untuk memperoleh atau menghasilkan uang dimasa yang akan datang, namun secara arti luas investasi bertujuan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan secara pasif atau point utamanya ialah dalih atau ekspektasi mendapatkan taraf hidup atau kesejahteraan yang lebih baik dimasa depan, mengurangi inflasi, serta sebagai acuan untuk menghemat pengeluaran pajak (Tandelilin,

2001). Ada beberapa tahapan bagi investor sebelum menentukan untuk melakukan kegiatan investasi yaitu: menentukan tujuan atau target dalam berinvestasi, kemudian menentukan kebijakan dalam investasi, menseleksi strategi portofolio yang dirasa paling efektif, serta pengukuran kerja portofolio. Investasi sendiri sebenarnya dapat meningkatkan taraf kehidupan berekonomi dalam masyarakat, kesempatan dalam bekerja, pendapatan negara, serta meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran masyarakat tentunya. Hal tersebut disebabkan karena investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi tentunya akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional, serta kesempatan memperoleh lapangan kerja (Sukirno, 2003). Dan juga serupa dengan pendapat (Nopirin, 2000) yang menyatakan bahwasanya untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi nasional maka sangat diperlukan adanya peningkatan produksi nasional.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional adalah hubungan yang bersifat global untuk meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Para ahli sering menganggap bahwa konsep hubungan internasional sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, sampai politik internasional. Aktor dalam hubungan internasional ini adalah setiap pihak yang memiliki peran dan melakukan interaksi satu sama lain dalam konsep fenomena hubungan internasional itu sendiri.

Pada awalnya Hubungan Internasional hanya terfokus pada isu-isu tradisional tetapi kemudian hal ini bergeser seiring dengan datangnya globalisasi yang memunculkan berbagai isu-isu baru dalam Hubungan Internasional seperti dalam bidang ekonomi politik internasional mengenai sistem pembayaran dengan platform digital yaitu *virtual currency*. Dalam studi Ekonomi Politik Internasional terdapat hubungan kausal antara ekonomi politik internasional dan ekonomi politik domestik, dimana ketika terjadi perubahan dilingkungan ekonomi internasional akan berdampak pada pilihan kebijakan di domestic. Kemudian, terdapat berbagai

macam perspektif dalam memandang fenomena-fenomena yang terkait masalah politik dan ekonomi internasional dan salah satunya adalah perspektif Merkantilisme yang dipilih peneliti serta relevan terhadap fenomena *Virtual currency* di Indonesia. Globalisasi ekonomi telah membawa negara-negara di dunia lebih dekat dari sebelumnya dan seakan menghadirkan sistem ekonomi yang tunggal di seluruh dunia. Negara-negara sangat tertarik pada distribusi keuntungan yang mempengaruhi kesejahteraan domestik, kekayaan nasional, dan kekuatan militer melalui lintas batas negara untuk pembangunan ekonomi domestik itu sendiri.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran